

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Nurmandi, 2010, *Manajemen Pelayan Publik*. Yogyakarta, PT.Sinergi Visi Utama.
- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- E. Utrecht, 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Ikhtisar.
- Inu Kencana Syafii, 2011, *Manajemen Pemerintahan*. Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika.
- Prajudi Atmosudirjo, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Septi Nur Wijayanti, Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara Teori & Prakteknya di Indonesia*, Yogyakarta, Laboratorium Hukum UMY.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2007, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebiasaan dan Implementasi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sirajuddin dkk, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang, Setara Press.
- Sirajuddin, Didik Sukrisno dan Winardi, 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partipasi dan Keterbukaan Informasi*, Malang, Setara Press.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Prolem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta, Grasindo.

Jurnal :

- Abiyoga Wisnu Ahimsa, “Kualitas Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Limpung Dan Bandar Kabupaten Batang Tahun 2015-2016”, *Journal of Politic and Government Studies Universitas Diponegoro*, [Vol.8 No.2 \(2019\)](#).
- Arif Zainuddin, “ Analisis Kepuasan Masyarakat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, Vol.1 No.1 (April, 2016).

- Erick S. Holle, “Pelayanan Publik Melalui *Electronic Government*: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan *Public Service*”, *Jurnal Sasi*, Vol.17 No. 3 (Juli- September, 2011).
- Isnani Muallidin, “Implementasi Reformasi Organisasi Perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol.15 No. 3 (Maret, 2012).
- M. Budi Mulyadi, “Pelayanan Perizinan Terpadu dalam Meningkatkan Investasi Dan Pertumbuhan UMKM”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Vol.4 No.1 (Juni, 2018).
- Mulyadi, Romdana, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu)”, *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, Vol.7 No.2 (Desember, 2018).
- Neneng Siti Maryam, “Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik”, *JIPSI* Vol. 6 No. 1, (2016).
- Ni Luh Putu Puspitasari, I K G Bendesa, “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol.5 No.1 (2016).
- Rendra Eko Wismanu, *et al.*, “Model Inovasi Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Perizinan dalam Mewujudkan *Smart City* (Studi Pendekatan Sistem Dinamik pada Pemerintah Kabupaten Sragen)”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, Vol.4 No.4 (Desember,2018).
- Trenda Aktiva Oktariyanda, Soesilo Zauhar dan Siti Rochmah, “Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Mencapai Kualitas Pelayanan Publik Yang Optimal”, *Jurnal Wacana*, Vol. 16, No. 4 (2013).

Surat Kabar:

Ekonomi, Republika, (Jakarta), 25 Juli 2019.

Sektor Riil , Sindo News, (Jakarta), 4 September 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

R.I., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang “Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah”.

R.I., Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang “Pelayanan Publik”.

R.I., Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang “Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”.

R.I., Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2018 tentang “Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta”.

Internet:

Antara , *Yogyakarta Targetkan 50 Persen Warga Unduh Jogja Smart Service*, 18 Maret 2019, <https://www.antaranews.com/berita/811649/yogyakarta-targetkan-50-persen-warga-unduh-jogja-smart-service>, diakses pada 1 Juli 2019, jam 21.20 WIB.

Pemerintah Kota Yogyakarta, www.jogjakota.go.id, diakses 1 Juli 2019, jam 11.00 WIB.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, www.pmperinan.jogjakarta.go.id/sejarah_dpmp, diakses 9 Juli 2019, jam 09.29 WIB.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, www.oss.go.id diakses pada hari jumat 9 Agustus 2019, jam 10.00 WIB.